

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Muharisa Syafelina^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: muharisasyafelina33@gmail.com

Tanggal Masuk:

14 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

20 Oktober 2025

Tanggal Diterima:

09 November 2025

Keywords: *Local Own-Source Revenue; Balance Funds; Economic Growth; Financial Performance.*

How to cite (APA 6th style)

Syafelina, M., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (4), 1839-1851.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3614>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to examine the effect of local own-source revenue, balance funds, and economic growth on the financial performance of local governments. This research employs a quantitative approach. The sample was selected using a total sampling technique, consisting of 190 local government observations in West Sumatra Province during the 2014–2023 period. Data were analyzed using panel data analysis with EViews 12. The results indicate that local own-source revenue and economic growth have a positive and significant effect on the financial performance of local governments. This implies that the higher the local own-source revenue, the better the financial performance of local governments, and the higher the economic growth, the greater the regional income that can optimize local revenue. Meanwhile, balance funds have a negative effect on the financial performance of local governments, meaning that the greater the transfer funds received from the central government, the higher the regional dependency, which leads to a decrease in financial performance.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penerapan otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan sistem desentralisasi. Melalui desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan di wilayahnya. Penyelenggaraan desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan daerahnya (Rosemary et al., 2016). Menurut Noeng et al. (2023), otonomi daerah adalah suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.

Kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Ilmi, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi

terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah membutuhkan ukuran penilaian yang kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran (Pasaribu, 2020).

Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat pada Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal tersebut tercermin dari berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilakukan maupun yang masih berjalan hingga saat ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Berdasarkan website Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, diketahui pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 2,57%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5,14%. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang secara signifikan menekan laju pertumbuhan ekonomi serta berdampak pada penurunan pendapatan daerah pada periode tersebut.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang bisa menunjukkan hasil positif atau negatif. Jika pada suatu periode pertumbuhan ekonomi bernilai positif, berarti kegiatan ekonomi sedang meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan bernilai negatif, maka kegiatan ekonomi sedang menurun. Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja perekonomian nasional, termasuk seberapa efektif investasi dari dalam dan luar negeri. Peningkatan GDP menunjukkan adanya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan dana investasi yang dapat mendorong peningkatan hasil produksi dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional. (Febrianty & Putra, 2023).

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan yang berlaku, serta dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Melalui APBD, dapat dilihat sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang digunakan untuk mendukung berbagai pengeluaran pemerintah daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Selain pendapatan asli daerah, komponen penting lain yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen tersebut berasal dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membantu pendanaan pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halaskova (2016), dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih terlalu kuat sehingga pendekatan yang bersifat sentralistik dan seragam dari pusat justru menghambat munculnya inisiatif serta kreativitas di tingkat daerah. Penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudin & Hastuti (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dengan periode penelitian yang mencakup tahun anggaran 2014 hingga 2023.

Penelitian Wahyudin & Hastuti (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Heryanti (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif

signifikan, dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Machmud & Radjak (2018) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Hubungan keagenan dalam konteks tata kelola pemerintahan mencerminkan peran strategis publik (masyarakat) sebagai pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dan pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana (agen) dalam mengelola urusan pemerintahan secara efektif. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah guna mengelola serta mengatur kebutuhan daerah secara transparan dan akuntabilitas dalam semua keputusan yang diterangkan. Sebagai pihak yang menerima wewenang, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan secara optimal, termasuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan berbagai sumber daya yang berpotensi menjadi penerimaan daerah guna memperkuat tingkat kemandirian fiskalnya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena hasilnya diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penyebab utama yang menentukan kinerja keuangan di tingkat daerah. Sementara itu, kajian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan temuan dalam studi-studi sebelumnya yang menunjukkan hasil variatif terkait pengaruh beberapa variabel terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Agency Theory memaparkan adanya relasi antara pihak pemberi mandat (prinsipal) dan pelaksana mandat (agen) yang dibangun melalui suatu perjanjian formal sebagai dasar kerja sama, di mana prinsipal memberikan mandat atau pelimpahan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, agen bertanggung jawab untuk mengelola serta mengatur sumber daya yang telah dipercayakan oleh prinsipal dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai dengan harapan pihak pemberi mandat (Jensen, M. C., & Meckling, 1976).

Penerapan teori keagenan dalam konteks pemerintahan Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit tercermin melalui keterkaitan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen), yang mana dilimpahkannya wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola urusan daerah namun tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat sebagai konstituen utama (Pradana & Handayani, 2023). Gagasan ini berupaya memberikan penjelasan dinamika keterkaitan antara prinsipal dan agen dengan menekankan pentingnya mekanisme kontraktual atau kesepakatan yang menata pembagian fungsi dan tanggung jawab antara keduanya guna mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan bersama (Andaresta et al., 2020).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013). Berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* menyatakan bahwa kinerja adalah hasil atau keluaran dari program/kegiatan yang akan atau telah dilakukan sehubungan dengan pemanfaatan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Dan Pengawasan Keuangan Daerah* bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Pemerintah sebagai aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atas capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim & Kusufi, 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada ketentuan dalam regulasi fiskal yang diatur melalui *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan didapatkan pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuannya untuk melimpahkan ruang kemandirian kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaannya sendiri, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang mencerminkan asas desentralisasi fiskal.

Pendapatan asli daerah sendiri merupakan penghasilan yang diperoleh dari potensi lokalnya dan mencerminkan karakteristik khas suatu daerah, karena diperoleh melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang tidak daerah lain miliki (Halim & Kusufi, 2017). Komponen PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, laba atas pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan jenis penerimaan sah lainnya yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah memiliki fungsi strategis sebagai pilar utama untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah, karena bertugas menanggung sebagian besar beban belanja untuk memenuhi kebutuhan publik. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi krusial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, PAD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan penggunaan anggarannya secara mandiri berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing (Pasaribu, 2020).

Dana Perimbangan

Mengacu pada *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, dana perimbangan diartikan sebagai alokasi dana melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan fiskal untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah. Dana ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan prinsip desentralisasi, dengan tujuan agar setiap daerah mampu menjalankan pemerintahan serta layanan kepada masyarakat secara efektif sekaligus mandiri berdasarkan kemampuan dan karakteristik wilayahnya.

Dana perimbangan terdiri atas tiga elemen pokok, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), secara esensial adalah bantuan keuangan dari pusat untuk membantu pemerintah daerah menutup kesenjangan fiskal. Tingginya penerimaan dana transfer mencerminkan besarnya ketergantungan keuangan terhadap pusat (Ginting et al., 2023).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses untuk memperbaiki serta menjaga keberlanjutan perekonomian suatu negara. Ini merupakan indikator penting untuk menilai perkembangan atau kemajuan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu (Ilmi, 2023). Perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung menggunakan harga konstan dari tahun ke tahun. Daerah yang mandiri cenderung dapat memanfaatkan anggarannya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah tersebut dan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

PDRB atas harga konstan berfungsi memantau laju pertumbuhan ekonomi riil pada tiap tahunnya (Noeng et al., 2023). PDRB sendiri mencerminkan nilai yang dihasilkan dari peningkatan output seluruh unit usaha, yaitu total output barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diperoleh dari penjumlahan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan akumulasi nilai output barang dan jasa yang disesuaikan dengan harga pada tahun acuan tertentu (Heryanti, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai fungsi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, karena bertambah besar kontribusi PAD, maka daerah akan mempunyai

kemampuan lebih tinggi guna membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tidak bergantung pada bantuan dari pusat. Oleh sebab itu, daerah harus menaikkan kapasitas pengelolaan keuangan untuk mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri, guna meminimalkan kebergantungan pada sumber pembiayaan yang berasal dari otoritas pusat. Dengan PAD yang optimal, daerah mendapatkan keleluasaan lebih dalam mengelola dan mengatur keuangan daerahnya secara berkelanjutan (Febrianty & Putra, 2023).

PAD sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja fiskal kinerja daerah, Pasaribu (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, di mana peningkatan PAD secara langsung memperbesar kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Temuan ini selaras dengan kajian Niswani (2022) menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh tahun 2016-2020, karena pendapatan asli daerah memberikan fleksibilitas anggaran bagi daerah. Sejalan dengan itu, Natalia & Suprpto (2023) terlihat bahwa PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang besar memiliki keleluasaan yang lebih luas dalam menyusun dan melakukan program pembangunan yang cocok dengan karakteristik, potensi, dan prioritas daerahnya.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Perimbangan didapatkan pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan mengurangi ketidakseimbangan keuangan antar daerah. Namun demikian, menurut prinsip desentralisasi fiskal ketergantungan yang besar terhadap dana perimbangan justru bisa melemahkan tingkat kemandirian keuangan daerah, disebabkan mereka cenderung lebih bertumpu pada dana transfer dibandingkan menggali potensi sumber pendapatan secara optimal (Wahyudin & Hastuti, 2020).

Niswani (2022), dalam penelitiannya di Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa semakin besar proporsi dana perimbangan yang diperoleh oleh suatu daerah, maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena menurunnya insentif dan motivasi pemerintah daerah untuk mendalami serta mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah ketika struktur penerimaannya didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Pasaribu (2020), dalam penelitiannya di Papua Barat juga mendukung temuan tersebut, dengan hasil menunjukkan dana perimbangan berdampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Apabila daerah bergantung pada dana transfer pusat cenderung mengalami kelambatan dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga kinerja keuangan tidak tercapai secara optimal.

Selain itu, Fatmawati & Pratiwi (2019) dalam studinya di Cimahi memperkuat temuan ini, dengan menyatakan bahwa tingginya penerimaan dana transfer tidak searah dengan kinerja keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer yang berlebihan menyebabkan daerah cenderung tidak maksimal dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pemasukkan asli daerahnya.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang semakin berkembang di suatu wilayah, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah. Ketika perekonomian suatu daerah tumbuh secara positif, kontribusi sektor-sektor strategis seperti pajak daerah dan retribusi juga ikut meningkat.

Penelitian oleh Ilmi (2023) yang dilakukan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Bertambah tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka bertambah besar juga kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai pengeluaran secara mandiri. Penelitian tersebut sejalan dengan Noeng et al. (2023) yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan lebih mampu mengembangkan sumber daya ekonominya, yang kemudian meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan. Dengan bertambahnya penerimaan, ketergantungan daerah pada pemerintah pusat secara bertahap dapat dikurangi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap

kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai saluran, seperti peningkatan aktivitas usaha, terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan, dan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi (Heryanti, 2019).

H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini melibatkan seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, sedangkan data mengenai pertumbuhan ekonomi diperoleh dari PDRB yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Semua populasi tersebut dijadikan sampel sehingga penelitian ini juga disebut penelitian sensus (populasi). Penelitian memakai teknik total sampling, yang mana semua populasi akan dijadikan sampel untuk penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK RI (www.bpk.go.id) serta data Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2023. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Pasaribu (2020), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil atau ukuran dari analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara baik dan benar. Dalam menilai kinerja keuangan tersebut, digunakan berbagai rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur atau indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Adapun rumus rasio ketergantungan daerah menurut Mahmudi (2011) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2017), Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan berasal dari wilayah daerahnya dan dipungut menurut aturan yang berlaku. Pendapatan ini mencakup berbagai jenis sumber pendapatan yang diperoleh daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semuanya berkontribusi pada kemandirian keuangan daerah dalam mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah}$$

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana melalui pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk menghasilkan keseimbangan dalam hal finansial pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik. Dana ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, terutama dalam hal kapasitas fiskal

yang dimiliki daerah-daerah dengan berbagai kondisi ekonomi yang berbeda. Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} + \text{Dana Bagi Hasil (DBH)}$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memakai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mentiadakan efek inflasi, oleh karena itu bisa memperlihatkan gambaran yang lebih tepat mengenai pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dalam periode yang diamati.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dana panel, yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross-sectional*. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam estimasi model regresi data panel yaitu model *Common effect*, *Fixed effect*, dan *Random effect*. Saat memilih model terbaik maka dilakukan *uji Chow* dan *uji Hausman* dilakukan. Setelah mendapatkan model terbaik maka akan dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model. Setelah model lulus uji asumsi klasik, maka akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (F), dan uji parsial (T). Estimasi model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_4 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kemandirian Keuangan Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, 2, 3,$	= Koefisien regresi dari variabel independen
X1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Dana Perimbangan
X3	= Pertumbuhan Ekonomi
ε	= error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	27.31500	25.17605	4.684158	77.59458
Median	27.32000	25.17500	5.095000	77.76500
Maximum	28.06000	27.21000	6.830000	91.08000
Minimum	26.66000	24.01000	1.100000	43.14000
Std. Dev.	0.34628	0.598425	1.394302	6.058063
Skewness	0.07476	0.932695	-1.205367	-1.173471
Kurtosis	2.08592	4.970885	3.646380	8.185900
Jarque-Bera	6.79170	58.29888	49.31647	256.5134
Probability	0.03351	0.000000	0.000000	0.000000
Sum Sq. Dev.	22.66315	67.68334	367.4310	6936.324
Observations	190	190	190	190

Sumber : Output Eviews 12

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat diketahui jumlah data yang berhasil diolah sebanyak 190 data. Untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 6,058063 dan rata-rata 77,59458. Nilai minimum dari variabel ini yaitu 43,14000 dan nilai maksimum sebesar 91,08000. Untuk variabel pendapatan asli daerah (X1) diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,346281 dan nilai rata-rata PAD sebesar 27,31500. Pendapatan asli daerah tertinggi sebesar 28,06000, sedangkan PAD terendah sebesar Rp 26,66000. Variabel dana perimbangan (X2) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,598425 dengan nilai rata-rata sebesar 25,17605. Dana perimbangan terbesar diterima oleh pemerintah daerah sebesar 27,21000, sedangkan terendah sebesar 24,01000. Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki standar deviasi sebesar 1,394302 dengan nilai rata-rata 4,684158. Nilai maksimum sebesar 6,830000 dan nilai minimum sebesar 1,10000.

Metode Regresi Data Panel

Setelah dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausman* maka model regresi yang terpilih dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect (FEM).

Tabel 2
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Haus Estimator Fixed Effect Model				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-504.2263	92.71905	-5.438217	0.0000
X1	29.05027	3.909746	7.430219	0.0000
X2	-8.494993	1.602039	-5.302611	0.0000
X3	0.466093	0.221408	2.105128	0.0368
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.612940	Mean dependent var	77.59458	
Adjusted R-squared	0.564557	S.D. dependent var	6.058063	
S.E. of regression	3.997600	Akaike info criterion	5.717784	
Sum squared resid	2684.776	Schwarz criterion	6.093756	
Log likelihood	-521.1895	Hannan-Quinn criter.	5.870085	
F-statistic	12.66862	Durbin-Watson stat	1.539813	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 12

Uji Asusi Klasik

Metode panel memiliki beberapa keunggulan yang mana keunggulan tersebut dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Verbeek (2000); Gujarati (2003); Wibisono (2005); Aulia (2004:27) dalam buku Ajija (2011:52) menyimpulkan bahwa keunggulan lain pada data panel yaitu memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik, maka data panel tidak membutuhkan uji asumsi klasik seperti normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas pada penelitian dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara masing-masing variabel independen yang ada pada model regresi. Jika terdapat korelasi antara variabel independen maka terjadinya multikolinearitas dan standar errot yang tinggi sehingga menyebabkan tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitain ini:

Tabel 3
Uji Multikolineartas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.678342	-0.041830
X2	0.678342	1.000000	-0.087958
X3	-0.041830	-0.087958	1.000000

Sumber : Output Eviews 12

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90 (Ghozali, 2016). Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai korelasi untuk variabel X1 dan X2 sebesar 0,678342, X2 dan X3 sebesar -0,087958, dan untuk X1 dan X3 sebesar -0,041830.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4	
Uji Koefisien Determinasi	
R-squared	0.612940
Adjusted R-squared	0.564557
S.E. of regression	3.997600
Sum squared resid	2684.776
Log likelihood	-521.1895
F-statistic	12.66862
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Output Eviews 12

Dalam analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur sejauh aman pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai koefisien diantara nol sampai dengan satu. Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4 dapat diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,612840, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah sebesar 61,2%. Untuk sisanya yaitu sebesar 388% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5	
Uji F	
R-squared	0.612940
Adjusted R-squared	0.564557
S.E. of regression	3.997600
Sum squared resid	2684.776
Log likelihood	-521.1895
F-statistic	12.66862
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Output Eviews 12

Uji F dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 5, maka nilai F dari hasil olah data Eviws 12 yaitu nilai *F-Statistic* sebesar 12,66862 dengan nilai prob.(*F-Statistic*) sebesar 0,0000. Hal itu menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh dari uji $F < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6
Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-504.2263	92.71905	-5.438217	0.0000
X1	29.05027	3.909746	7.430219	0.0000
X2	-8.494993	1.602039	-5.302611	0.0000
X3	0.466093	0.221408	2.105128	0.0368

Sumber : Output Eviews 12

Uji t dalam analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji t dilihat dari probabilitas values, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Selain itu, melakukan analisis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , jika hasil uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan Tabel 6, variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai prob. 0,0000 dan nilai t_{hitung} sebesar 7,430219 dengan t_{tabel} sebesar 1,972662692 sehingga pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Pada variabel dana perimbangan memiliki nilai prob. 0,0000 dan nilai t_{hitung} sebesar -5,302611 dengan t_{tabel} sebesar 1,972662692 sehingga dana perimbangan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai prob. 0,0368 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,105128 dengan t_{tabel} sebesar 1,972662692 sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis 1 diterima artinya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, semakin baik pendapatan asli daerah yang dihasilkan pemerintah maka akan semakin meningkat persentase kinerja keuangan daerah. Sehingga implikasi dari hasil tersebut adalah semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah & Agriyanto (2019), Aswar (2019), S. P. Putri (2023), Fatmawati & Pratiwi (2019), Ilmi (2023), R. A. R. Putri (2020), Febrianty & Putra (2023), Putri & Yuniarta (2023), Natalia & Suprpto (2023), Andaresta et al. (2020), Wahyudin & Hastuti (2020), dan Prastiwi & Aji (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan untuk bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah, pemerintah akan melakukan usaha yang lebih besar untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari periode sebelumnya sehingga adanya peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunannya.

Dalam hal teori keagenan, dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen diberi mandat oleh prinsipal (publik) untuk mengelola keuangan secara bertanggungjawab. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan, maka semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menggali potensi lokal secara efisien. Dengan meningkatkan PAD, agen menunjukkan bahwa mereka mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri dan hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis 2 diterima artinya dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah,

artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan S. P. Putri (2023), Fatmawati & Pratiwi (2019), R. A. R. Putri (2020), Putri & Yuniarta (2023), Andaresta et al. (2020), dan Pratiwi & Aji (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin besar proporsi dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi dorongan untuk secara aktif mengembangkan kemampuan sumber pendapatan asli yang dimilikinya. Sehingga dapat menimbulkan sikap pasif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya, karena lebih fokus pada pemanfaatan dana tranfer yang diterima dari pemerintah pusat dan akan menurunkan tingkat kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal teori keagenan, hasil ini menunjukkan peran agen yang terlalu bergantung pada transfer dari pusat sehingga dapat menghilangkan insentif untuk bertindak efisien dalam mendorong pengoptimalan potensi lokal karena merasa kebutuhan fiskalnya telah terjamai oleh pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa daerah perlu lebih aktif menggali potensi pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis 3 diterima artinya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. hal tersebut ditunjukkan dari nilai prob. $< 0,05$.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmi (2023), yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka bertambah juga persentase kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk membiayai pengeluarannya secara mandiri. Peningkatan aktivitas ekonomi mendorong bertambahnya penerimaan dari sektor-sektor seperti pajak dan retribusi yang menjadi sumber terbesar pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat memperkuat posisi keuangan dan meminimalkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat sehingga mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih kuat. Oleh karena itu, diharapkan kepada pelaksana pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti sektor perdagangan dan pariwisata. Hal ini akan sejalan dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam menghasilkan laporan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis menggunakan Eviews 12 sudah didapatkan hasil analisis yang dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin rendah kinerja keuangan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diperoleh maka semakin tinggi juga kinerja keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan

Terbatasnya variabel independen yang dianalisis, dalam penelitian ini menguji pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah seperti belanja modal, kapasitas kelembagaan, maupun kebijakan fiskal daerah yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Cakupan wilayah penelitian ini hanya mencakup 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh mungkin belum dapat digeneralisasi secara keseluruhan atau periode yang berbeda, karena adanya perbedaan karakteristik fiskal dan struktur ekonomi tiap daerah dapat bervariasi.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel independen yang relevan, seperti belanja modal, indeks kapasitas kelembagaan, efisiensi belanja daerah, atau kebijakan fiskal lainnya. Diharapkan setiap daerah menggali dan memahami sumber daya yang bisa di maksimalkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah lebih fokus pada sektor yang mempunyai potensi untuk berkembang, seperti sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Perluasan cakupan wilayah dan waktu penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Penelitian selanjutnya dapat mencakup beberapa provinsi di Indonesia atau wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. dkk. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salempa Empat.
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–6.
- Awwaliyah, N. F., & Agriyanto, R. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25–46.
- Fatmawati, A. P., & Pratiwi, O. C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 62–69.
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi (JKA)*, 1(2), 30–46.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7 (2), 315–320.
- Halaskova, M. (2016). Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services. *Journal of Local Self-Government*, 14(3), 379–397. [https://doi.org/10.4335/14.3.379-397\(2016\)ISSN](https://doi.org/10.4335/14.3.379-397(2016)ISSN)
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.)*.
- Heryanti, C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Ilmi, M. B. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah , Size Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 216–223.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *In Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*.

- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *JRAK*, 9(2), 303–318.
- Niswani, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 64–78.
- Noeng, A. Y., Kolit, Y. A. Du. D., & Rato, E. Y. Da. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020). *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(2), 184–190.
- Pasaribu, S. H. (2020). The Influence Of Local Revenue And Balance Funds To The Financial Performance Of District/City Government In The Province Of West Papua. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 191–201.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Putri, R. A. R. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Putri, S. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068–2082.
- Putri, & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147.
- Rosemary, O., Justine, C., & Barry, B. (2016). Local Government Financial Autonomy : A Comparative Analysis Of Nigeria And Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38–54.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.